



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 21723-21733

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Inovasi dan Digitalisasi dalam Fundraising Pesantren

Nur Fitrah Aniza¹, Kautsar Alghifari², Kamiliya Jihan³, Rizman Reza⁴, Samiyono⁵, Ade Sofyan Mulazid⁶

Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Darunnajah

nurfitrah911@darunnajah.ac.id, muhammadfari68@darunnajah.ac.id, Kamiliyajihanalya@darunnajah.ac.id,
rizmanreza@darunnajah.ac.id, samiyono@darunnajah.ac.id, adesofyanmulazid@uinjkt.ac.id

Abstrak

Pesantren dituntut membangun kemandirian keuangan tanpa meninggalkan fungsi pendidikan, sosial, dan dakwah. Penelitian ini bertujuan menganalisis model fundraising Pesantren Darunnajah 2 Cipining serta merumuskan strategi inovasi dan digitalisasi yang sesuai dengan karakter organisasi pesantren. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan, pengurus tata usaha, dan pengelola unit usaha; observasi operasional; serta dokumentasi kegiatan dan pencatatan keuangan selama Januari–Maret 2025. Data dianalisis secara tematik melalui reduksi, penyajian, penafsiran, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fundraising pesantren bertumpu pada tujuh unit usaha produktif, yaitu koperasi/DNC Mart, kantin, percetakan/fotokopi, perkebunan, warung telepon, laundry, dan Darunnajah Fried Chicken. Model tersebut menciptakan sirkulasi ekonomi internal yang relatif berkelanjutan, sedangkan penghimpunan dana eksternal masih terbatas pada santunan sosial dan panggung gembira tahunan. Digitalisasi diperlukan pada dua jalur yang saling melengkapi: penguatan tata kelola usaha melalui sistem kasir, persediaan, pelaporan, dan dashboard keuangan; serta perluasan fundraising melalui QRIS, media sosial, siaran langsung, crowdfunding, dan pengelolaan basis data donatur. Implementasi disarankan dilakukan bertahap dengan memperhatikan akuntabilitas, keamanan data, literasi digital, dan kesesuaian nilai pesantren. Penelitian ini juga menghasilkan roadmap implementasi dan indikator evaluasi yang dapat digunakan oleh pengelola. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi sebaiknya memperkuat, bukan menggantikan, filosofi kemandirian ekonomi yang telah menjadi fondasi fundraising pesantren.

Kata Kunci: Digitalisasi; Fundraising; Kemandirian Ekonomi; Pesantren; Usaha Produktif

1. Latar Belakang

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjalankan fungsi pendidikan, pembinaan karakter, pelayanan sosial, dan penguatan masyarakat secara bersamaan. Kompleksitas fungsi tersebut memerlukan sumber pembiayaan yang stabil agar penyelenggaraan pendidikan tidak sepenuhnya bergantung pada iuran santri, bantuan pemerintah, atau donasi yang bersifat tidak tetap. Dalam konteks ini, kemandirian ekonomi menjadi bagian penting dari keberlanjutan kelembagaan pesantren. Pengalaman berbagai pesantren menunjukkan bahwa pengembangan produk, koperasi, serta unit usaha yang dekat dengan kebutuhan santri dapat memperkuat ekonomi lembaga sekaligus membuka ruang pembelajaran kewirausahaan [1]–[5].

Pesantren Darunnajah 2 Cipining di Kabupaten Bogor mengembangkan pola yang menempatkan tata usaha atau unit-unit usaha produktif sebagai pusat sirkulasi keuangan internal. Koperasi/DNC Mart, kantin, percetakan/fotokopi, perkebunan, warung telepon, laundry, dan Darunnajah Fried Chicken melayani kebutuhan santri, guru, wali santri, serta masyarakat sekitar. Model ini tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjaga agar sebagian pengeluaran warga pesantren tetap berputar di dalam ekosistem kelembagaan. Pola semacam ini sejalan dengan gagasan penguatan ekonomi pesantren melalui diversifikasi usaha, kepemimpinan yang membangun kepercayaan, dan partisipasi warga lembaga [1], [2].

Pengembangan unit usaha pesantren juga memiliki nilai pendidikan. Santri dan pengelola dapat belajar mengenai pelayanan, disiplin operasional, tanggung jawab, dan etika usaha melalui kegiatan ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian mengenai perubahan pola pikir kewirausahaan santri menunjukkan bahwa usaha seperti laundry dapat menjadi media pembelajaran sekaligus penguatan kemandirian pesantren [3]. Di sisi lain, kontribusi pesantren terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi lebih kuat ketika unit usaha mampu menyerap tenaga kerja, menghubungkan pemasok lokal, dan membangun produk yang memiliki pasar di luar lingkungan pesantren [4], [5].

Meskipun memiliki fondasi usaha internal yang kuat, kegiatan fundraising eksternal di Darunnajah 2 Cipining masih terkonsentrasi pada santunan sosial dan panggung gembira yang diselenggarakan sekali dalam setahun. Model berbasis peristiwa memiliki kelebihan karena memadukan penghimpunan dana, silaturahmi, dan komunikasi dampak sosial. Namun, frekuensi yang rendah menyebabkan penerimaan sulit diprediksi, hubungan dengan donatur tidak tercatat secara berkelanjutan, dan partisipasi masih bergantung pada kehadiran fisik. Literatur

mengenai fundraising lembaga Islam memperlihatkan bahwa strategi yang efektif memerlukan segmentasi donatur, komunikasi yang terencana, kemudahan pembayaran, dan pengelolaan hubungan jangka panjang [7], [8].

Perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan pembayaran digital membuka peluang bagi pesantren untuk memperluas model fundraising. Penggunaan QRIS, transfer digital, platform crowdfunding, media sosial, dan siaran langsung dapat menurunkan hambatan transaksi serta menjangkau alumni dan simpatisan di luar wilayah pesantren. Studi tentang crowdfunding wakaf menunjukkan bahwa keberhasilan kanal digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh proses verifikasi program, kualitas narasi, transparansi penggunaan dana, dan komunikasi berkala kepada donatur [9]. Transformasi wakaf tunai di Indonesia juga menekankan pentingnya kolaborasi, literasi, tata kelola, dan kepercayaan dalam adopsi platform digital [10].

Digitalisasi tidak berhenti pada penerimaan donasi. Unit usaha pesantren memerlukan pencatatan transaksi, pengendalian persediaan, rekonsiliasi kas, dan pelaporan yang terintegrasi. Tanpa sistem informasi yang memadai, pertumbuhan jumlah transaksi dapat meningkatkan risiko kesalahan, kebocoran pendapatan, dan keterlambatan laporan. Inovasi digital pada pengelolaan zakat dan wakaf memperlihatkan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa literasi digital, keamanan data, biaya implementasi, dan kebutuhan pengawasan [11]–[15].

Konteks nasional memperkuat relevansi transformasi tersebut. Pertumbuhan transaksi QRIS dan pembayaran digital menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa dengan transaksi nontunai [16]. Namun, percepatan inovasi juga menuntut penguatan manajemen risiko, keamanan sistem, verifikasi pengguna, dan peningkatan literasi digital [17]. Pesantren perlu memanfaatkan peluang ini secara proporsional, yaitu mengadopsi teknologi yang paling sesuai dengan kapasitas organisasi tanpa membangun ketergantungan pada sistem yang sulit dipelihara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis model fundraising yang berjalan di Pesantren Darunnajah 2 Cipining, mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasannya, serta merumuskan strategi digitalisasi yang dapat diterapkan secara bertahap. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi dua jalur penguatan keuangan pesantren, yaitu digitalisasi unit usaha sebagai sumber pendapatan internal dan digitalisasi fundraising eksternal sebagai sarana perluasan partisipasi. Analisis tidak diarahkan untuk mengganti karakter kemandirian pesantren, tetapi untuk memperkuat tata kelola, transparansi, jangkauan, dan keberlanjutan model yang telah berjalan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Desain tersebut dipilih karena model fundraising Darunnajah 2 Cipining memiliki karakter kelembagaan, pola pengelolaan usaha, dan tradisi pengambilan keputusan yang perlu dipahami secara kontekstual. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah hubungan antara unit usaha, kegiatan pengumpulan donasi, tata kelola, serta peluang digitalisasi dalam batas satu organisasi secara mendalam [18].

Pengumpulan data dilakukan selama Januari–Maret 2025 melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara diarahkan kepada pimpinan pesantren, pengurus tata usaha, dan pengelola unit-unit usaha untuk memperoleh informasi mengenai sumber pendapatan, alur transaksi, pembagian tanggung jawab, pelaporan, serta pengalaman pengumpulan donatur. Observasi dilakukan terhadap proses pelayanan dan pencatatan pada unit usaha, sedangkan dokumentasi mencakup catatan keuangan yang tersedia, materi kegiatan santunan sosial, panggungembira, dan dokumen pendukung lain yang relevan.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan tahapan pengorganisasian data, reduksi, pengodean, penyajian pola, penafsiran hubungan antartema, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis mengikuti prinsip analisis data kualitatif yang menekankan keterkaitan antara kondensasi data, tampilan data, dan verifikasi kesimpulan [19]. Tema utama yang digunakan meliputi kemandirian ekonomi, diversifikasi unit usaha, pola fundraising eksternal, kesiapan digital, tata kelola, risiko, dan keberlanjutan.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Informasi dari pimpinan dibandingkan dengan keterangan pengelola unit usaha, hasil observasi, dan dokumen yang tersedia. Peneliti juga membedakan secara jelas antara temuan empiris dan rekomendasi pengembangan. Rekomendasi digitalisasi disusun dari interpretasi terhadap kebutuhan yang ditemukan di lapangan dan diperkuat dengan literatur mengenai kewirausahaan pesantren, digital fundraising, pembayaran digital, crowdfunding, serta tata kelola keuangan Islam [1]–[17].

Batasan penelitian terletak pada penggunaan satu kasus dan belum tersedianya data keuangan rinci yang seragam untuk seluruh unit usaha. Oleh karena itu, penelitian tidak membandingkan tingkat profitabilitas antarunit dan tidak mengukur dampak finansial digitalisasi secara kuantitatif. Hasil penelitian lebih tepat digunakan sebagai kerangka analisis dan roadmap implementasi yang dapat diuji lebih lanjut melalui penelitian tindakan, evaluasi sistem, atau analisis biaya-manfaat setelah teknologi diterapkan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Model Kemandirian Ekonomi Berbasis Tata Usaha

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa fundraising Darunnajah 2 Cipining tidak dipahami secara sempit sebagai kegiatan meminta sumbangan, melainkan sebagai kemampuan lembaga menciptakan dan mempertahankan sumber daya ekonomi. Tata usaha menjadi tulang punggung karena mengelola kebutuhan yang muncul setiap hari di lingkungan pesantren. Pendapatan berasal dari pertukaran nilai yang nyata: warga pesantren memperoleh barang atau layanan, sementara surplus kegiatan kembali mendukung operasional lembaga. Dengan demikian, model ini menggabungkan fungsi komersial, pelayanan, dan pembiayaan pendidikan.

Kekuatan utama model tersebut adalah kedekatan antara pasar dan pengelola. Santri, guru, wali santri, serta masyarakat sekitar merupakan pengguna yang kebutuhan dasarnya dapat dipetakan secara relatif stabil. Kondisi ini menurunkan ketidakpastian pasar dibandingkan usaha yang sepenuhnya bergantung pada konsumen eksternal. Temuan ini selaras dengan kajian mengenai program One Pesantren One Product, yang menempatkan basis komunitas, pengembangan produk, dan partisipasi kelembagaan sebagai modal pemberdayaan ekonomi [1]. Namun, kedekatan pasar tidak berarti unit usaha dapat dikelola tanpa standar pelayanan, pencatatan, dan evaluasi.

Model tata usaha juga memperlihatkan peran kepemimpinan pesantren dalam membangun kepercayaan. Pengelola memperoleh mandat untuk menjalankan unit, tetapi legitimasi tetap bersumber dari pimpinan pesantren. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan kewirausahaan pesantren dipengaruhi oleh kepemimpinan yang mampu menggabungkan musyawarah, pemberdayaan, inovasi, dan pengawasan [2]. Dalam konteks Darunnajah 2 Cipining, digitalisasi perlu diposisikan sebagai alat bantu kepemimpinan: data transaksi memberikan dasar keputusan, sedangkan kebijakan tetap mempertimbangkan nilai pendidikan dan kemaslahatan warga pesantren.

Sirkulasi ekonomi internal menghasilkan manfaat ganda. Pertama, pesantren memperoleh pendapatan untuk memperkuat operasional. Kedua, warga pesantren mendapatkan akses terhadap barang dan layanan tanpa harus keluar dari lingkungan lembaga. Ketiga, unit usaha berpotensi menjadi laboratorium kewirausahaan bagi santri. Penelitian tentang usaha laundry berbasis pesantren menunjukkan bahwa kegiatan usaha dapat membentuk keberanian, tanggung jawab, dan pola pikir kewirausahaan apabila diintegrasikan dengan sistem pembelajaran dan pendampingan [3]. Oleh sebab itu, digitalisasi sebaiknya juga membuka ruang pembelajaran, misalnya melalui keterlibatan santri pada pencatatan stok, desain konten, layanan pelanggan, atau analisis penjualan di bawah pengawasan.

Kemandirian ekonomi tidak berarti menutup diri dari donasi eksternal. Temuan penelitian justru menunjukkan adanya model hibrida: usaha internal menyediakan arus pendapatan berulang, sedangkan kegiatan donasi mendukung program sosial dan memperluas jaringan. Pendekatan hibrida lebih tahan terhadap perubahan karena lembaga tidak bergantung pada satu sumber. Dalam perspektif pemberdayaan, pesantren dapat menjadi pusat ekonomi umat ketika unit usahanya terhubung dengan kebutuhan masyarakat, pemasok lokal, dan kegiatan sosial [4], [5]. Tantangannya adalah memastikan setiap sumber dana dicatat secara terpisah agar tujuan komersial, pendidikan, dan sosial tidak bercampur secara tidak terkendali.

3.2. Diversifikasi Unit Usaha dan Sirkulasi Nilai Internal

Darunnajah 2 Cipining mengoperasikan tujuh unit usaha yang melayani kebutuhan berbeda. Diversifikasi tersebut mengurangi ketergantungan pada satu jenis pendapatan dan memungkinkan lembaga menangkap berbagai transaksi rutin. Tabel 1 merangkum peran setiap unit berdasarkan informasi dalam naskah.

Tabel 1. Unit Usaha Produktif Pesantren Darunnajah 2 Cipining

Unit Usaha	Layanan Utama	Segmen yang Dilayani
Koperasi/DNC Mart	Kebutuhan harian, alat tulis, pakaian, perlengkapan ibadah, makanan dan minuman	Santri, guru, dan wali santri
Kantin/Walapa	Makanan, gorengan, es, dan minuman	Santri, guru, dan wali santri
Percetakan/Fotokopi	Pencetakan dokumen dan kebutuhan administrasi	Santri, guru, dan wali santri
Perkebunan	Produksi bahan pangan dan dukungan kebutuhan dapur	Internal pesantren
Warung Telepon	Layanan komunikasi	Santri
Laundry	Jasa cuci dan setrika	Santri dan guru
Darunnajah Fried Chicken	Makanan siap saji berbasis ayam goreng	Santri, guru, dan wali santri

Keberagaman unit menunjukkan adanya logika portofolio. Koperasi dan kantin berhubungan dengan transaksi berfrekuensi tinggi, sedangkan percetakan, laundry, dan warung telepon memenuhi kebutuhan layanan tertentu. Perkebunan memiliki fungsi yang berbeda karena dapat mengurangi ketergantungan dapur terhadap pasokan luar, sementara DFC berpotensi menjadi produk yang dikembangkan sebagai identitas usaha pesantren.

Pembagian fungsi ini mengurangi persaingan internal dan memperluas titik interaksi ekonomi dengan warga pesantren.

Meskipun demikian, diversifikasi juga meningkatkan kompleksitas pengelolaan. Setiap unit memiliki karakter persediaan, siklus kas, biaya, risiko kerusakan, dan kebutuhan tenaga kerja yang berbeda. Pencatatan manual yang terpisah dapat menyulitkan pimpinan melihat posisi keseluruhan. Masalah yang mungkin muncul bukan hanya kebocoran kas, tetapi juga stok mati, pembelian yang tidak terencana, perbedaan standar harga, dan ketidakjelasan kontribusi tiap unit. Karena penelitian ini tidak memiliki data keuangan seragam, kesimpulan mengenai unit paling menguntungkan tidak dapat dibuat; yang dapat ditegaskan adalah kebutuhan akan sistem pencatatan yang konsisten.

Digitalisasi perlu dimulai dengan standarisasi proses sebelum pemilihan aplikasi. Setiap unit perlu memiliki kode barang atau jasa, daftar harga, prosedur penerimaan kas, pencatatan pengeluaran, rekonsiliasi harian, dan penanggung jawab yang jelas. Aplikasi kasir tidak akan menghasilkan informasi berkualitas apabila data awal tidak tertib. Dengan demikian, proyek digitalisasi harus dipahami sebagai perubahan tata kelola, bukan sekadar pengadaan perangkat.

Pengembangan usaha pesantren juga perlu mempertimbangkan keterhubungan dengan pendidikan. Unit usaha dapat menyediakan ruang praktik bagi santri melalui tugas terbatas dan terukur, tanpa mengganggu kegiatan belajar. Pelatihan e-commerce bagi santri menunjukkan bahwa kemampuan digital dapat mendukung pembentukan wirausaha apabila disertai pendampingan dan praktik [6]. Darunnajah 2 Cipining dapat mengembangkan modul praktik sederhana, seperti pemotretan produk, pencatatan stok, penyusunan deskripsi, dan pelayanan pelanggan, sehingga digitalisasi memberi manfaat ekonomi sekaligus pedagogis.

3.3. Fundraising Eksternal Berbasis Kegiatan Tahunan

Penghimpunan dana eksternal dilaksanakan terutama melalui santunan sosial dan panggung gembira. Kedua kegiatan memiliki fungsi yang lebih luas daripada pengumpulan dana. Santunan sosial memperlihatkan keberpihakan pesantren kepada masyarakat, sedangkan panggung gembira menampilkan kreativitas santri dan memperkuat hubungan dengan wali santri serta simpatisan. Model ini menghasilkan suasana partisipasi yang organik karena donasi muncul dalam konteks pengalaman sosial dan emosional yang nyata.

Kelemahan model tahunan adalah rendahnya kontinuitas. Interaksi dengan donatur berlangsung intensif menjelang kegiatan, tetapi tidak selalu dilanjutkan dengan komunikasi terstruktur setelah kegiatan selesai. Data donatur, preferensi program, riwayat kontribusi, dan bentuk keterlibatan belum menjadi aset organisasi yang dikelola secara sistematis. Akibatnya, setiap kepanitiaan berpotensi mengulang proses pencarian kontak dari awal. Strategi fundraising lembaga Islam menunjukkan bahwa segmentasi, pilihan kanal, dan komunikasi berulang diperlukan untuk mengubah donatur insidental menjadi pendukung jangka panjang [7].

Keterbatasan lain adalah jangkauan geografis. Alumni atau simpatisan yang berada di luar Bogor hanya dapat berpartisipasi apabila memperoleh informasi dan memiliki kanal pembayaran yang mudah. Digitalisasi dapat memperpanjang usia kegiatan: sebelum acara, media sosial digunakan untuk menjelaskan tujuan; saat acara, siaran langsung dan QRIS memudahkan partisipasi; setelah acara, laporan dampak dan ucapan terima kasih menjaga kepercayaan. Digitalisasi zakat di Indonesia memperlihatkan bahwa kemudahan pembayaran melalui fintech dan transfer dapat memperluas partisipasi [8].

Perbandingan dua jalur fundraising menunjukkan bahwa usaha produktif dan donasi tidak seharusnya dipertentangkan. Usaha internal unggul pada kesinambungan dan kedekatan pasar, sedangkan donasi digital unggul pada jangkauan dan kemungkinan menghubungkan pesantren dengan jejaring yang lebih luas. Model ideal adalah mempertahankan tata usaha sebagai fondasi, lalu menggunakan kanal donasi untuk program yang jelas, terukur, dan memiliki manfaat sosial atau pendidikan.

Tabel 2. Perbandingan Jalur Fundraising Darunnajah 2 Cipining

Aspek	Usaha Produktif	Donasi Kegiatan Tahunan	Pengembangan Digital
Frekuensi	Harian dan berulang	Sekali dalam setahun	Kampanye dapat dilakukan sesuai program
Sumber	Transaksi internal dan wali santri	Donatur yang hadir	Alumni, wali santri, simpatisan, dan publik
Jangkauan	Lokal	Jaringan undangan	Lintas wilayah melalui kanal daring
Prediktabilitas	Relatif lebih stabil	Sulit diprediksi	Dapat dipantau melalui data kampanye
Mekanisme	Penjualan barang/jasa	Kegiatan sosial dan seni	QRIS, transfer, crowdfunding, dan media sosial

Aspek	Usaha Produktif	Donasi Kegiatan Tahunan	Pengembangan Digital
Pengelolaan	Unit usaha	Panitia tahunan	Tim lintas fungsi dan basis data donatur

3.4. Kesenjangan Digital dan Kesiapan Organisasi

Temuan menunjukkan bahwa kebutuhan digitalisasi muncul karena proses transaksi, persediaan, dan pelaporan masih banyak dilakukan secara manual. Kondisi tersebut tidak otomatis berarti organisasi tidak siap. Pesantren telah memiliki unit, penanggung jawab, alur pelayanan, dan komunitas pengguna yang jelas. Unsur-unsur ini merupakan modal awal penting. Kesiapan digital perlu dinilai dari kesesuaian proses, kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan, ketersediaan perangkat, kualitas jaringan, dan kemauan untuk menggunakan data dalam pengambilan keputusan.

Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor paling menentukan. Sistem kasir dan dashboard tidak akan berfungsi apabila pengelola merasa teknologi menambah beban atau tidak memahami manfaatnya. Pelatihan perlu menggunakan contoh transaksi nyata dari unit usaha, bukan penjelasan teknis yang terlalu umum. Setiap pengelola harus dapat melakukan transaksi, koreksi, penutupan kas, pemeriksaan stok, dan pencetakan laporan sederhana. Pesantren juga perlu menunjuk pendamping internal yang dapat membantu ketika terjadi kesalahan.

Dukungan pimpinan diperlukan untuk menetapkan standar yang sama bagi semua unit. Tanpa mandat yang jelas, sebagian unit mungkin menggunakan sistem baru sementara unit lain tetap mempertahankan pencatatan lama, sehingga data tidak dapat digabungkan. Kepemimpinan kewirausahaan pesantren yang membangun sinergi dan kebijakan fleksibel menjadi dasar penting dalam proses perubahan [2]. Fleksibilitas berarti implementasi dapat dilakukan bertahap, tetapi tujuan akhir berupa pencatatan yang akurat dan dapat diaudit harus tetap konsisten.

Infrastruktur juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak seluruh unit memerlukan perangkat mahal. Unit dengan transaksi tinggi memerlukan kasir yang stabil, printer struk, dan koneksi yang memadai; unit dengan transaksi lebih rendah dapat menggunakan perangkat bergerak. Sistem harus memiliki mekanisme cadangan ketika jaringan terganggu dan prosedur sinkronisasi setelah layanan kembali normal. Pemilihan aplikasi perlu mempertimbangkan biaya langganan, kemudahan ekspor data, dukungan teknis, hak akses, dan kemampuan bekerja secara luring.

Kesiapan organisasi dapat ditingkatkan melalui proyek percontohan. DFC, kantin, dan koperasi merupakan kandidat karena transaksi lebih sering dan manfaat pencatatan dapat terlihat lebih cepat. Setelah prosedur stabil, sistem diperluas ke laundry, percetakan, dan unit lainnya. Pendekatan bertahap mengurangi resistensi dan memungkinkan pesantren belajar dari kesalahan sebelum skala diperbesar.

Tabel 3. Analisis Kesiapan Digital Pesantren

Dimensi	Kondisi Awal	Kebutuhan Penguatan
Proses	Pencatatan dan pelaporan belum seragam	Standardisasi transaksi, stok, kas, dan pelaporan
Sumber daya manusia	Kemampuan digital beragam	Pelatihan berbasis tugas dan pendamping internal
Kepemimpinan	Koordinasi melalui struktur pesantren	Mandat, target, dan evaluasi lintas unit
Teknologi	Perangkat dan koneksi berbeda antarunit	Aplikasi sederhana, ekspor data, serta mode cadangan
Data	Tersebar di masing-masing unit	Kode akun, basis data terpusat, dan hak akses
Budaya organisasi	Kepercayaan dan kedekatan komunitas kuat	Menggabungkan amanah dengan verifikasi berbasis data

3.5. Digitalisasi Operasional Unit Usaha

Digitalisasi operasional sebaiknya dibangun dalam empat lapisan: transaksi, persediaan, keuangan, dan pelaporan manajerial. Lapisan transaksi merekam penjualan dan metode pembayaran. Lapisan persediaan mencatat barang masuk, barang keluar, stok minimum, dan kehilangan. Lapisan keuangan menghubungkan penerimaan, pengeluaran, serta rekonsiliasi kas. Lapisan pelaporan menyajikan informasi ringkas untuk pimpinan, seperti nilai penjualan, jumlah transaksi, produk paling sering dibeli, dan perbedaan kas.

Pada tahap awal, setiap unit harus memiliki katalog barang atau jasa yang bersih. Katalog mencakup nama, kategori, harga, dan satuan. Duplikasi nama perlu dihindari karena akan mengganggu analisis. Perubahan harga harus memiliki tanggal berlaku dan otorisasi. Untuk koperasi dan kantin, penggunaan kode produk mempercepat transaksi; untuk laundry dan percetakan, sistem perlu mencatat jenis layanan, jumlah, status penyelesaian, dan pembayaran.

Pengendalian persediaan perlu mendapat perhatian karena sebagian besar risiko usaha ritel terjadi pada stok. Sistem digital dapat membantu pencatatan pembelian, pemakaian, dan penjualan, tetapi pemeriksaan fisik tetap diperlukan. Pesantren dapat menetapkan stok opname berkala dan membandingkan hasil fisik dengan catatan sistem. Selisih tidak selalu berarti kecurangan; penyebabnya dapat berupa kesalahan input, kerusakan, pemakaian internal, atau transaksi yang belum tercatat. Karena itu, sistem harus diikuti prosedur investigasi yang adil.

Rekonsiliasi kas harian merupakan pengendalian dasar. Pada akhir jam pelayanan, pengelola membandingkan uang tunai, transaksi QRIS atau transfer, serta total pada sistem. Selisih dicatat dan dijelaskan sebelum laporan ditutup. Praktik ini membangun budaya akuntabilitas tanpa menghilangkan kepercayaan. Dalam tata kelola lembaga Islam, amanah perlu didukung bukti transaksi agar pertanggungjawaban dapat dilakukan secara transparan [13], [14].

Dashboard pimpinan tidak perlu terlalu rumit. Informasi utama dapat berupa pendapatan per unit, tren transaksi, persediaan kritis, pengeluaran utama, dan status setoran. Akses harus dibedakan berdasarkan peran. Kasir hanya memerlukan fungsi transaksi, pengelola unit dapat melihat laporan unitnya, sedangkan pimpinan dan bagian keuangan memiliki akses konsolidasi. Pemisahan hak akses mengurangi risiko perubahan data tanpa kewenangan.

Digitalisasi juga memudahkan evaluasi kontribusi unit terhadap tujuan pesantren. Ukuran kinerja tidak hanya laba. Unit dapat dinilai dari tingkat pelayanan, keterjangkauan harga, ketepatan stok, kesempatan belajar bagi santri, dan kontribusi kepada program sosial. Pendekatan ini menjaga agar digitalisasi tidak menggeser misi pendidikan menjadi semata-mata komersial. Teknologi harus membantu pesantren menyeimbangkan efisiensi, kebermanfaatan, dan keberlanjutan.

3.6. Integrasi Pembayaran Digital dan QRIS

Pembayaran digital merupakan titik masuk yang relatif mudah karena manfaatnya langsung dirasakan oleh pengguna dan pengelola. QRIS dapat digunakan pada unit usaha maupun kegiatan donasi. Satu kode dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi, sehingga pesantren tidak perlu menyediakan banyak rekening atau perangkat. Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan transaksi QRIS dan peningkatan jumlah pengguna serta merchant, yang menandakan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap pembayaran digital [16].

Penerapan QRIS pada unit usaha harus diikuti rekonsiliasi. Setiap transaksi perlu dicatat pada sistem kasir dengan metode pembayaran yang benar. Pengelola tidak boleh hanya melihat notifikasi pada telepon karena notifikasi dapat terlewat atau salah dibaca. Rekening penerima juga perlu ditentukan secara jelas dan dipisahkan apabila diperlukan untuk memudahkan pelaporan. Bukti transaksi dan laporan penyedia jasa pembayaran harus disimpan sesuai periode retensi yang ditetapkan.

Pada kegiatan santunan sosial dan panggungembira, QRIS dapat ditempatkan pada materi publikasi, layar panggung, meja registrasi, dan siaran langsung. Namun, pesan yang menyertai kode harus menjelaskan tujuan, identitas penerima, periode kampanye, dan kontak resmi. Donatur perlu memperoleh konfirmasi serta laporan setelah dana digunakan. Kemudahan pembayaran harus berjalan bersama kejelasan informasi agar kepercayaan tidak menurun.

Penggunaan pembayaran digital menghadirkan risiko baru, seperti pemalsuan kode QR, pengalihan rekening, phishing, dan akses tidak sah. Bank Indonesia menekankan bahwa inovasi digital perlu diimbangi penguatan keamanan, manajemen risiko, dan literasi [17]. Oleh karena itu, kode QR harus dibuat melalui penyedia resmi, diperiksa sebelum kegiatan, dan tidak boleh disebarkan dari akun yang tidak terverifikasi. Pesantren juga perlu menetapkan satu kanal konfirmasi resmi bagi donatur.

3.7. Crowdfunding, Siaran Langsung, dan Media Sosial

Crowdfunding dapat digunakan untuk program yang memiliki tujuan, kebutuhan dana, penerima manfaat, dan batas waktu yang jelas. Contohnya adalah pengadaan sarana belajar, beasiswa santri, perbaikan fasilitas, pengembangan perkebunan, atau kegiatan sosial. Program perlu dipisahkan dari biaya operasional rutin agar donatur memahami dampak kontribusinya. Studi mengenai crowdfunding wakaf menunjukkan bahwa tahapan pengajuan, verifikasi, publikasi, sosialisasi, dan pelaporan merupakan bagian penting dari sistem [9].

Narasi kampanye harus berbasis fakta dan tidak mengeksploitasi penerima manfaat. Pesantren perlu menjelaskan masalah, solusi, anggaran, jadwal, dan pihak yang bertanggung jawab. Foto atau video digunakan dengan persetujuan dan tetap menjaga martabat santri maupun masyarakat. Informasi yang berlebihan atau tidak dapat diverifikasi dapat merusak kepercayaan. Prinsip transparansi harus diterapkan sejak sebelum dana dihimpun, bukan hanya setelah program selesai.

Siaran langsung kegiatan tahunan memperluas partisipasi alumni dan wali santri yang berada di luar daerah. Tautan donasi dapat ditampilkan selama acara, tetapi konten harus tetap menonjolkan pendidikan, kreativitas, dan dampak sosial. Tim media perlu menyiapkan jadwal, narasi, moderator, dan petugas yang memantau pertanyaan. Rekaman dapat diolah menjadi konten pendek yang memperpanjang jangkauan setelah acara selesai.

Media sosial sebaiknya dikelola sebagai kanal hubungan, bukan hanya papan pengumuman. Konten rutin dapat mencakup perkembangan unit usaha, proses produksi, kegiatan santri, laporan program, profil penerima manfaat, dan ucapan terima kasih. Konsistensi konten membangun pemahaman publik terhadap identitas pesantren. Penelitian mengenai digital fundraising menunjukkan bahwa media sosial, situs, aplikasi, dan integrasi fintech dapat meningkatkan jangkauan, tetapi memerlukan keamanan dan strategi pengelolaan yang jelas [11], [12].

Crowdfunding tidak selalu harus dilakukan melalui platform pihak ketiga. Untuk program kecil dan jaringan internal, pesantren dapat menggunakan halaman resmi, QRIS, dan formulir konfirmasi. Platform pihak ketiga lebih sesuai ketika pesantren membutuhkan jangkauan publik, verifikasi, dan fasilitas pelaporan. Pemilihan kanal perlu mempertimbangkan biaya, syarat pencairan, kepemilikan data donatur, reputasi platform, dan kesesuaian syariah.

Digitalisasi wakaf dan filantropi Islam menunjukkan pentingnya kolaborasi antaraktor, termasuk lembaga, regulator, penyedia teknologi, dan masyarakat [10], [15]. Pesantren dapat membangun kemitraan dengan bank syariah, lembaga zakat atau wakaf, alumni profesional, dan perguruan tinggi. Kemitraan tidak harus mengurangi kemandirian; justru dapat memberikan dukungan teknis, audit, pelatihan, dan akses jejaring yang belum dimiliki internal.

3.8. Basis Data Donatur dan Manajemen Hubungan

Salah satu kelemahan fundraising berbasis kegiatan adalah hilangnya pengetahuan organisasi setelah kepanitiaan berakhir. Basis data donatur dapat mengubah hubungan yang bersifat sesaat menjadi hubungan yang berkelanjutan. Data minimum meliputi nama, kontak, hubungan dengan pesantren, program yang diminati, riwayat kontribusi, kanal komunikasi yang disetujui, dan catatan tindak lanjut. Pengumpulan data harus disertai persetujuan dan penjelasan mengenai penggunaannya.

Donatur dapat dikelompokkan secara sederhana menjadi alumni, wali santri, masyarakat, mitra usaha, dan lembaga. Segmentasi membantu pesantren menyampaikan informasi yang relevan. Alumni mungkin tertarik pada beasiswa atau pengembangan pendidikan; wali santri pada fasilitas dan kegiatan santri; mitra usaha pada program pemberdayaan atau pengembangan produk. Segmentasi bukan untuk membedakan penghargaan, tetapi untuk meningkatkan kesesuaian komunikasi.

Siklus hubungan donatur mencakup pengenalan, partisipasi pertama, konfirmasi, pelaporan, dan keterlibatan kembali. Setelah donasi diterima, sistem mengirimkan konfirmasi dan ucapan terima kasih. Setelah program berjalan, donatur memperoleh pembaruan singkat. Pada akhir program, laporan penggunaan dana dan dampak disampaikan. Pola ini memperkuat kepercayaan dan mengurangi kebutuhan memulai kampanye dari nol setiap tahun.

WhatsApp Business dapat menjadi kanal awal karena telah dikenal luas, tetapi pengelolaannya harus terstruktur. Pesantren perlu menggunakan nomor resmi, template pesan yang sopan, jadwal komunikasi, dan pilihan berhenti menerima pesan. Penyebaran pesan yang terlalu sering dapat dianggap mengganggu. Data kontak tidak boleh disalin ke perangkat pribadi tanpa pengamanan. Untuk skala yang lebih besar, basis data dapat dipindahkan ke sistem manajemen hubungan donatur dengan hak akses terbatas.

Keberhasilan basis data tidak diukur dari banyaknya kontak, melainkan dari kualitas dan pemutakhiran data. Kontak ganda, nomor tidak aktif, atau informasi tanpa persetujuan justru meningkatkan risiko. Pesantren dapat melakukan verifikasi berkala dan mencatat sumber setiap data. Prinsip minimisasi data perlu diterapkan: hanya informasi yang benar-benar dibutuhkan yang dikumpulkan dan disimpan.

3.9. Transparansi, Akuntabilitas, dan Tata Kelola

Kepercayaan merupakan modal utama pesantren. Dalam sistem manual, kepercayaan sering bertumpu pada kedekatan personal dan reputasi pengelola. Digitalisasi tidak menggantikan modal sosial tersebut, tetapi menyediakan bukti yang membuat pertanggungjawaban lebih kuat. Setiap transaksi memiliki jejak, setiap program memiliki anggaran, dan setiap laporan dapat dibandingkan dengan data sumber. Penguatan audit syariah pada lembaga zakat dan wakaf menunjukkan pentingnya struktur pengawasan, dokumentasi, serta kesesuaian antara pengelolaan dana dan tujuan yang disampaikan [14].

Pesantren perlu memisahkan rekening dan pencatatan berdasarkan fungsi. Dana usaha, biaya pendidikan, donasi program, dan dana sosial sebaiknya tidak dicampur tanpa mekanisme yang jelas. Pemisahan memudahkan penelusuran dan mencegah penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan. Apabila satu rekening digunakan pada tahap awal, pencatatan harus memiliki kode program sehingga setiap penerimaan dan pengeluaran dapat direkonsiliasi.

Laporan kepada pimpinan dan donatur memiliki tingkat detail berbeda. Pimpinan membutuhkan laporan konsolidasi, arus kas, persediaan, dan selisih. Donatur membutuhkan informasi mengenai dana yang terkumpul, kegiatan yang dilaksanakan, manfaat, serta sisa dana. Publikasi tidak harus membuka informasi pribadi atau data sensitif. Transparansi berarti memberikan informasi yang relevan, benar, dan mudah dipahami, bukan mempublikasikan seluruh data tanpa batas.

Tata kelola juga mencakup pembagian kewenangan. Orang yang menerima uang sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pihak yang menyetujui pengeluaran dan menyusun laporan. Pada unit kecil, pemisahan tugas dapat dilakukan melalui pemeriksaan berkala oleh bagian keuangan atau pimpinan. Sistem digital perlu mencatat siapa yang membuat, mengubah, dan menyetujui transaksi. Jejak audit membantu organisasi memperbaiki kesalahan serta melindungi pengelola dari tuduhan yang tidak berdasar.

Inovasi digital pada zakat, wakaf, dan crowdfunding menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan keamanan merupakan syarat penerimaan masyarakat [10]–[15]. Bagi Darunnajah 2 Cipining, nilai amanah dapat diterjemahkan menjadi prosedur: bukti transaksi, laporan tepat waktu, rekonsiliasi, persetujuan berjenjang, dan komunikasi dampak. Integrasi nilai dan prosedur membuat digitalisasi tetap sesuai dengan identitas pesantren.

3.10. Risiko Digital dan Strategi Mitigasi

Digitalisasi membawa manfaat sekaligus risiko. Risiko teknis meliputi gangguan jaringan, kehilangan perangkat, kesalahan konfigurasi, dan kegagalan pencadangan. Risiko manusia meliputi kata sandi lemah, berbagi akun, salah input, dan ketergantungan pada satu operator. Risiko tata kelola mencakup akses tanpa kewenangan, perubahan data, pencampuran rekening, dan laporan yang tidak ditinjau. Risiko reputasi muncul apabila kampanye tidak jelas, laporan terlambat, atau akun resmi dipalsukan.

Mitigasi perlu disusun sesuai skala. Pesantren dapat memulai dengan akun terpisah untuk setiap pengguna, autentikasi ganda pada akun penting, pencadangan rutin, pembatasan hak akses, dan daftar perangkat yang diizinkan. Kata sandi tidak boleh dibagikan melalui grup terbuka. Apabila operator berganti, akses lama harus segera dicabut. Data laporan perlu diekspor secara berkala agar pesantren tidak sepenuhnya bergantung pada penyedia aplikasi.

Risiko perlindungan data juga penting dalam pengelolaan donatur dan santri. Nomor telepon, alamat, identitas, dan riwayat donasi merupakan data yang tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Pesantren perlu menetapkan siapa yang boleh mengakses data, tujuan penggunaan, lama penyimpanan, dan prosedur penghapusan. Konten foto dan video santri harus memperhatikan persetujuan serta keputusan.

Risiko syariah dan etika perlu diperiksa ketika pesantren menggunakan platform, biaya layanan, atau skema pembayaran tertentu. Program harus memiliki tujuan yang halal, dana digunakan sesuai akad atau pernyataan kampanye, dan biaya dipublikasikan secara wajar. Transformasi digital filantropi Islam memerlukan pengawasan agar kemudahan teknologi tidak mengurangi integritas pengelolaan [11], [13]–[15].

Manajemen risiko sebaiknya dituangkan dalam prosedur singkat yang mudah digunakan. Dokumen yang terlalu panjang cenderung tidak dibaca. Setiap unit dapat memiliki lembar pemeriksaan harian, prosedur gangguan sistem, kontak bantuan, dan langkah pelaporan insiden. Evaluasi dilakukan setelah insiden atau secara berkala untuk memastikan prosedur tetap relevan.

Tabel 4. Risiko Utama dan Mitigasi Digitalisasi

Risiko	Dampak	Mitigasi Prioritas
Gangguan sistem/jaringan	Transaksi terhenti atau tertunda	Mode luring, prosedur manual sementara, dan sinkronisasi
Akses tidak sah	Perubahan atau kebocoran data	Akun individual, autentikasi ganda, dan pembatasan hak akses
Kesalahan input	Laporan dan stok tidak akurat	Pelatihan, validasi, dan pemeriksaan penutupan harian
Pemalsuan kanal donasi	Kerugian donatur dan reputasi	Akun resmi terverifikasi dan kanal konfirmasi
Kehilangan data	Riwayat transaksi tidak tersedia	Pencadangan dan ekspor data berkala
Ketergantungan vendor	Kesulitan migrasi atau biaya meningkat	Evaluasi kontrak, kepemilikan data, dan format ekspor terbuka

3.11. Roadmap Implementasi Digitalisasi

Roadmap digitalisasi disusun bertahap agar perubahan dapat dikendalikan. Tahap pertama berfokus pada fondasi: pemetaan proses, penetapan tim, pembersihan data, pemilihan unit percontohan, dan penyiapan prosedur. Tahap kedua menerapkan kasir digital, QRIS, dan rekonsiliasi pada unit prioritas. Tahap ketiga mengintegrasikan laporan lintas unit dan membangun basis data donatur. Tahap keempat memperluas kanal crowdfunding, konten, serta evaluasi berbasis indikator.

Tim digitalisasi sebaiknya terdiri atas unsur pimpinan, tata usaha, keuangan, teknologi informasi, pengelola unit, dan komunikasi. Komposisi lintas fungsi mencegah proyek dipandang sebagai urusan teknis semata. Pimpinan menetapkan arah dan kewenangan; keuangan menentukan standar akun dan laporan; pengelola unit memastikan sistem sesuai alur kerja; tim teknologi menjaga perangkat dan keamanan; tim komunikasi mengelola kampanye serta hubungan donatur.

Pemilihan unit percontohan didasarkan pada frekuensi transaksi, kesiapan pengelola, dan potensi pembelajaran. DFC, kantin, dan koperasi layak diprioritaskan, tetapi keputusan akhir perlu mempertimbangkan kondisi nyata. Masa percontohan dapat digunakan untuk menguji daftar produk, metode pembayaran, penutupan kas, dan laporan. Masalah dicatat dalam log implementasi agar menjadi dasar perbaikan.

Setelah sistem stabil, integrasi dilakukan pada tingkat laporan, bukan harus memaksa semua unit menggunakan alur yang identik. Laundry memerlukan status pesanan, percetakan memerlukan spesifikasi layanan, dan perkebunan memerlukan pencatatan produksi serta pemakaian internal. Sistem harus cukup fleksibel untuk perbedaan tersebut, tetapi menggunakan struktur keuangan dan identitas transaksi yang konsisten.

Implementasi tidak selesai ketika aplikasi dipasang. Pesantren perlu menetapkan jadwal evaluasi, pemutakhiran prosedur, pelatihan ulang, dan penggantian operator. Anggaran pemeliharaan, perangkat, jaringan, dan dukungan teknis harus dihitung sebagai biaya berkelanjutan. Keputusan memperluas sistem dilakukan setelah manfaat percontohan dapat dibuktikan melalui data dan pengalaman pengguna.

Tabel 5. Roadmap Digitalisasi Fundraising dan Unit Usaha

Tahap	Periode	Fokus	Keluaran Utama
Fondasi	0–3 bulan	Pemetaan proses, tim, SOP, katalog, dan akun resmi	Standar kerja dan unit percontohan siap
Percontohan	3–6 bulan	POS, QRIS, rekonsiliasi, pelatihan, dan pencadangan	Transaksi digital pada unit prioritas
Integrasi	6–12 bulan	Dashboard, laporan lintas unit, dan basis data donatur	Informasi konsolidasi untuk pimpinan
Ekspansi	12–18 bulan	Crowdfunding, siaran langsung, konten, dan kemitraan	Jangkauan donasi dan partisipasi meningkat
Penguatan	Setelah 18 bulan	Audit, evaluasi manfaat, keamanan, dan pengembangan fitur	Sistem berkelanjutan dan dapat ditingkatkan

3.12. Indikator Kinerja dan Evaluasi

Evaluasi diperlukan agar digitalisasi tidak dinilai hanya dari keberadaan aplikasi. Indikator operasional dapat mencakup persentase transaksi yang tercatat, ketepatan penutupan kas, jumlah selisih stok, waktu penyusunan laporan, dan jumlah unit yang melakukan rekonsiliasi. Indikator fundraising mencakup jumlah donatur aktif, proporsi donatur berulang, jumlah program yang dilaporkan tepat waktu, jangkauan konten, dan waktu konfirmasi donasi.

Indikator keuangan harus digunakan secara hati-hati karena tujuan setiap unit berbeda. Pertumbuhan pendapatan penting, tetapi perlu dibaca bersama biaya, kualitas layanan, dan manfaat pendidikan. Harga yang terlalu tinggi mungkin meningkatkan margin namun mengurangi akses santri. Sebaliknya, harga yang terlalu rendah dapat membuat unit tidak berkelanjutan. Pimpinan perlu menetapkan keseimbangan yang sesuai dengan misi pesantren.

Evaluasi pengguna juga penting. Pengelola dapat diminta menilai kemudahan sistem, waktu transaksi, masalah yang sering muncul, dan kebutuhan pelatihan. Donatur dapat memberikan masukan mengenai kejelasan informasi, kemudahan pembayaran, serta kualitas laporan. Masukan kualitatif melengkapi angka dan membantu menemukan masalah yang tidak terlihat pada dashboard.

Pelaporan indikator dilakukan secara periodik dan ringkas. Laporan bulanan dapat digunakan untuk operasional unit, sedangkan evaluasi triwulanan membahas tren dan keputusan perbaikan. Evaluasi tahunan menghubungkan kinerja digital dengan tujuan kelembagaan. Pendekatan ini membuat digitalisasi menjadi proses pembelajaran organisasi, bukan proyek sekali selesai.

Tabel 6. Indikator Evaluasi Implementasi

Bidang	Indikator Awal	Tujuan Evaluasi
Transaksi	Transaksi tercatat dan rekonsiliasi selesai	Menilai disiplin pencatatan dan akurasi kas
Persediaan	Selisih stok dan frekuensi stok opname	Mengurangi kehilangan dan kekosongan barang
Pelaporan	Waktu penyusunan dan kelengkapan laporan	Mempercepat informasi bagi pimpinan
Fundraising	Donatur aktif, donatur berulang, dan kanal pembayaran	Menilai jangkauan dan keberlanjutan hubungan
Komunikasi	Pembaruan program dan laporan tepat waktu	Memperkuat transparansi dan kepercayaan
Sumber daya manusia	Pengguna aktif, kesalahan input, dan kebutuhan bantuan	Menentukan pelatihan serta dukungan

3.13. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, temuan memperluas pemahaman fundraising pesantren dari aktivitas penghimpunan donasi menjadi arsitektur pendanaan yang menggabungkan usaha produktif, relasi sosial, dan teknologi. Tata usaha menciptakan pendapatan berbasis pertukaran, sementara donasi memobilisasi solidaritas. Digitalisasi menjadi penghubung karena menyediakan data, memperluas jangkauan, dan meningkatkan akuntabilitas. Model ini menjelaskan bahwa kemandirian dan keterbukaan terhadap dukungan eksternal dapat berjalan bersama.

Temuan juga menunjukkan bahwa transformasi digital pada lembaga berbasis agama dipengaruhi oleh logika kelembagaan. Keputusan tidak hanya didasarkan pada efisiensi, tetapi juga amanah, pendidikan, kepatutan, dan hubungan komunitas. Oleh karena itu, model implementasi yang terlalu berorientasi teknologi berisiko gagal. Sistem harus diterjemahkan ke dalam bahasa kebutuhan pengelola dan nilai pesantren.

Secara praktis, Darunnajah 2 Cipining dapat memulai dari standarisasi dan unit percontohan, kemudian memperluas sistem berdasarkan hasil evaluasi. Prioritas bukan membangun aplikasi khusus yang kompleks, melainkan memastikan transaksi tercatat, kas direkonsiliasi, stok dapat dipantau, dan laporan tersedia. Pada sisi donasi, prioritas adalah akun resmi, QRIS, basis data donatur, narasi program, dan pelaporan dampak.

Bagi pesantren lain, roadmap ini dapat diadaptasi sesuai skala. Pesantren yang belum memiliki unit usaha perlu memulai dari pemetaan kebutuhan dan potensi, sedangkan pesantren dengan usaha besar dapat membutuhkan sistem akuntansi dan audit yang lebih kompleks. Karena penelitian ini merupakan studi kasus tunggal, transfer praktik harus mempertimbangkan struktur kepemimpinan, kemampuan sumber daya manusia, jaringan, dan kondisi pasar masing-masing lembaga.

3.14. Model Integrasi Fundraising Digital Pesantren

Model integrasi yang dihasilkan penelitian ini terdiri atas empat siklus yang saling berhubungan, yaitu penciptaan nilai, pencatatan nilai, komunikasi nilai, dan pemanfaatan kembali nilai. Penciptaan nilai terjadi ketika unit usaha menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan warga pesantren atau ketika program sosial menghasilkan manfaat bagi penerima. Pencatatan nilai dilakukan melalui sistem transaksi, persediaan, rekening, dan laporan. Komunikasi nilai dilakukan melalui media sosial, laporan program, siaran langsung, serta hubungan donatur. Pemanfaatan kembali nilai diwujudkan ketika surplus usaha dan dana program dialokasikan secara tepat untuk pendidikan, pelayanan, pengembangan usaha, atau kegiatan sosial. Siklus ini mencegah digitalisasi berhenti pada pembayaran dan menempatkannya sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan. Model tersebut sejalan dengan temuan bahwa penguatan ekonomi pesantren membutuhkan hubungan antara produk, komunitas, kepemimpinan, dan proses pemberdayaan [1]–[5].

Dalam model ini, unit usaha dan fundraising eksternal menggunakan infrastruktur data yang berhubungan tetapi tetap memiliki pencatatan terpisah. Data unit usaha digunakan untuk menilai kinerja operasional dan kemampuan mendukung lembaga, sedangkan data donasi digunakan untuk memastikan kesesuaian tujuan, pelaporan program, dan hubungan dengan donatur. Pemisahan ini penting agar pendapatan komersial tidak dianggap sebagai dana terikat dan donasi program tidak digunakan untuk kebutuhan lain tanpa persetujuan. Pada tingkat pimpinan, kedua jenis informasi dapat disajikan dalam dashboard konsolidasi yang memperlihatkan kesehatan ekonomi pesantren tanpa menghilangkan identitas sumber dana.

Strategi kanal mengikuti prinsip kesesuaian. Transaksi harian menggunakan POS dan QRIS karena memerlukan kecepatan dan rekonsiliasi. Kegiatan tahunan menggunakan media sosial, siaran langsung, QRIS, dan formulir donatur karena membutuhkan interaksi dalam waktu tertentu. Program dengan target dan periode khusus dapat menggunakan crowdfunding karena memerlukan halaman kampanye, pembaruan, serta pelaporan yang lebih terstruktur. Hubungan jangka panjang menggunakan basis data dan pesan berkala. Penggunaan satu kanal untuk seluruh kebutuhan justru dapat menimbulkan ketidakefisienan. Literatur digital fundraising dan crowdfunding menegaskan bahwa pemilihan kanal, narasi, verifikasi, serta transparansi harus disesuaikan dengan karakter program dan donatur [7]–[12].

Keberlanjutan model bergantung pada kemampuan pesantren mengelola perubahan personel. Kepanitiaan, pengelola unit, dan santri dapat berganti, sedangkan data dan prosedur harus tetap tersedia. Oleh karena itu, setiap sistem perlu memiliki dokumentasi, daftar peran, jadwal pencadangan, serta proses serah terima. Pengetahuan tidak boleh hanya tersimpan pada satu orang atau satu perangkat. Pesantren dapat melibatkan santri secara terarah sebagai bagian dari pembelajaran, tetapi akses data keuangan dan donatur tetap dibatasi sesuai tanggung jawab. Kombinasi antara kaderisasi dan kontrol membuat inovasi dapat bertahan melampaui masa jabatan pengelola.

Model integrasi ini juga menyediakan dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Setelah data transaksi stabil, pesantren dapat melakukan analisis permintaan, perencanaan pembelian, pengembangan produk, dan evaluasi program. Setelah basis data donatur tertata, pesantren dapat mengukur retensi, minat program, dan efektivitas komunikasi. Namun, analisis lanjutan hanya layak dilakukan apabila kualitas data dan tata kelola telah memadai. Prinsip bertahap tetap penting: membangun pencatatan yang benar lebih mendesak daripada menambahkan fitur

canggih. Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital menjadi proses peningkatan kapasitas yang realistis, terukur, dan selaras dengan nilai amanah.

4. Kesimpulan

Pesantren Darunnajah 2 Cipining memiliki model fundraising yang berpusat pada kemandirian ekonomi melalui tujuh unit usaha produktif. Model ini menjaga sirkulasi pengeluaran warga pesantren agar sebagian kembali mendukung lembaga, menyediakan layanan harian, dan berpotensi menjadi media pembelajaran kewirausahaan. Penghimpunan dana eksternal melalui santunan sosial dan panggung gembira memperkuat relasi sosial, tetapi masih terbatas dari sisi frekuensi, jangkauan, pencatatan donatur, dan prediktabilitas. Digitalisasi direkomendasikan melalui dua jalur yang terintegrasi. Jalur pertama adalah digitalisasi operasional unit usaha melalui standarisasi proses, sistem kasir, pengelolaan persediaan, rekonsiliasi, pelaporan, dan dashboard. Jalur kedua adalah digitalisasi fundraising eksternal melalui QRIS, media sosial, siaran langsung, crowdfunding, dan basis data donatur. Kedua jalur perlu didukung pembagian kewenangan, transparansi, keamanan data, literasi digital, dan prosedur manajemen risiko. Implementasi perlu dilakukan bertahap, dimulai dari pemetaan proses dan unit percontohan, kemudian integrasi laporan serta perluasan kanal fundraising. Keberhasilan tidak hanya diukur dari peningkatan penerimaan, tetapi juga dari akurasi pencatatan, ketepatan laporan, kualitas pelayanan, keterlibatan donatur, manfaat pendidikan, dan kesesuaian dengan nilai pesantren. Digitalisasi yang tepat tidak menggantikan filosofi kemandirian Darunnajah 2 Cipining, melainkan memperkuat kapasitas organisasi untuk mengelola sumber daya secara amanah, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian berikutnya disarankan melakukan pengukuran sebelum dan sesudah implementasi, membandingkan biaya dan manfaat sistem, serta mengevaluasi penerimaan pengguna dan donatur. Penelitian komparatif pada beberapa pesantren juga diperlukan untuk menguji apakah model integrasi usaha produktif dan fundraising digital dapat diterapkan pada konteks kelembagaan yang berbeda.

Referensi

- [1] D. S. Muhyiddin, N. Ahmad, A. Suhartini, H. Ahyani, and N. Mutmainah, "Community Economic Empowerment Through the One Pesantren One Product Program at Pagelaran III Islamic Boarding School, Subang, Indonesia," *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 8, no. 1, pp. 101–122, 2022, doi: 10.20885/jielariba.vol8.iss1.art7.
- [2] M. A. Nur and N. Yaqien, "Kepemimpinan Kiai dalam Mengembangkan Wirausaha di Pesantren," *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, vol. 8, no. 1, 2023, doi: 10.18860/jmpi.v1i1.20506.
- [3] A. Bashith, M. Yunus, A. M. K. Amrullah, A. M. Ridwan, R. L. Mkumbachi, S. Amin, and W. S. Adji, "Change in Santri's Entrepreneurial Mindset Through the Salafi Model Quality Management System in Indonesia Pesantren," *Abjadia: International Journal of Education*, vol. 7, no. 1, 2022, doi: 10.18860/abj.v7i1.15768.
- [4] F. Qalbina and M. R. Saputra, "Kontribusi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Riset Manajemen*, vol. 1, no. 4, pp. 437–449, 2023, doi: 10.54066/jurma.v1i4.2666.
- [5] Z. Abidin, "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Bisnis Usaha Mandiri," *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, vol. 6, no. 2, pp. 374–385, 2022, doi: 10.29407/ja.v6i2.16575.
- [6] M. F. A. Muzakir, M. Maisaroh, and T. Tatik, "Pelatihan E-Commerce untuk Mendorong Terwujudnya Wirausaha Santri pada Yayasan ASWAJA Nusantara, Sleman, Yogyakarta," *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, vol. 4, no. 1, pp. 17–24, 2022, doi: 10.20885/jamali.vol4.iss1.art3.
- [7] R. A. Kasri and N. I. S. Putri, "Fundraising Strategies to Optimize Zakat Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 10, no. 1, 2018, doi: 10.15408/aiq.v10i1.6191.
- [8] M. Rizaludin As, "Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia," *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, vol. 1, no. 1, 2022, doi: 10.15408/tadabbur.v1i1.27866.
- [9] A. Alam, R. Sukmana, D. Priandana, and F. A. Bafana, "Waqf Crowdfunding System on Donation Application: A Conceptual Model Case in Indonesia and Implemented Strategies to Boost Waqf Digitalization," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 16, no. 1, pp. 1–22, 2023, doi: 10.47411/al-awqaf.Vol16Iss1.178.
- [10] H. H. Adinugraha, M. Shulthoni, and Z. H. Sain, "Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia: Insights into the Development of Digitalization," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, vol. 3, no. 1, pp. 50–66, 2024, doi: 10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4.
- [11] A. Nurhidayah and M. Yazid, "Inovasi Digital dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf," *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2, pp. 48–64, 2024, doi: 10.70136/el-iqtishod.v8i2.531.
- [12] A. Sarif and R. Ariyanti, "Digital Innovation in Zakat and Waqf Management: Case Study on Sharia Crowdfunding Platforms," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, vol. 7, no. 1, pp. 410–417, 2025, doi: 10.56338/ijhess.v7i1.6942.
- [13] H. Lubis, N. Nuryanti, and E. Z. Adibitia, "Digital-Based Cash Waqf Management at Waqf Institutions in Indonesia," *Management of Zakat and Waqf Journal*, vol. 6, no. 1, pp. 19–38, 2024, doi: 10.15642/MZW.2024.6.1.19-38.
- [14] M. I. H. Kamaruddin, Z. Shafii, M. M. Hanefah, S. Salleh, and N. Zakaria, "Exploring Shariah Audit Practices in Zakat and Waqf Institutions in Malaysia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 15, no. 3, pp. 402–421, 2024, doi: 10.1108/JIABR-07-2022-0190.
- [15] B. Kasmon, S. S. Ibrahim, D. Daud, R. R. I. Raja Hisham, and S. Dian Wisika Prajanti, "FinTech Application in Islamic Social Finance in Asia Region: A Systematic Literature Review," *International Journal of Ethics and Systems*, pp. 213–237, 2024, doi: 10.1108/IJOES-07-2023-0155.
- [16] Bank Indonesia, "Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2024," Bank Indonesia, Jakarta, 2024.
- [17] Bank Indonesia, "Pentingnya Penguatan Manajemen Risiko di Tengah Pesatnya Inovasi Digital," *Siaran Pers No. 26/161/DKom*, Aug. 3, 2024.
- [18] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2018.
- [19] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2014.
- [20] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2018.